

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan temuan hasil penelitian, analisa serta pembahasannya, secara umum dapat disimpulkan bahwa penerapan *punishment point system* dalam tata tertib sekolah di SMP Negeri 1 Ciamis merupakan salah satu upaya pihak sekolah dalam mengatasi masih tingginya tingkat kerawanan peserta didik dalam kedisiplinan di sekolah. Penyusunan serta penerapan *punishment point system* dalam tata tertib sekolah di SMP Negeri 1 Ciamis dilaksanakan berdasarkan payung hukum berupa Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 14/U/1974 tanggal: 1 Mei 1974. Penerapan *punishment point system* bukanlah tujuan akhir akan tetapi merupakan jembatan untuk membentuk karakter siswa yang berdisiplin dan mampu bertanggung jawab terhadap semua tindakan-tindakannya.

Proses penyusunan dan penerapan *punishment point system* dalam tata tertib sekolah di SMP Negeri 1 Ciamis melibatkan berbagai pihak terkait (*stake holder*) dengan pelaksanaan pendidikan terutama kepala sekolah, wakil kepala urusan kesiswaan, guru bimbingan konseling, guru bimbingan dan konseling, wali kelas, guru mata pelajaran, tenaga kependidikan, siswa, orang tua siswa, komite sekolah, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis selaku pembina. Proses sosialisasi yang menyeluruh dan berkelanjutan merupakan kunci keberhasilan penerapan *punishment point system* dalam tata tertib sekolah di SMP Negeri 1 Ciamis sekaligus merupakan kendala utama dalam penerapannya selain kendala administratif yang timbul dari alur prosedur pelaksanaan penerapan *punishment point system* dalam tata tertib sekolah yang melibatkan berbagai pihak (wakil kepala urusan kesiswaan, guru bimbingan dan konseling, wali kelas, guru mata pelajaran, tenaga kependidikan).

Implikasi nyata dari penerapan *punishment point system* dalam tata tertib sekolah di SMP Negeri 1 Ciamis adalah dapat mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap tata tertib sekolah yang diindikasikan dengan

rendahnya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan siswa terhadap tata tertib sekolah, *punishment point system* membuat siswa lebih berhati-hati dalam bertindak untuk tidak melanggar tata tertib yang telah ditentukan karena selain merugikan dirinya sendiri dapat pula mengecewakan bahkan memermalukan orang tuanya melalui sangsi yang akan diterimanya. Dengan kata lain penerapan *punishment point system* dalam tata tertib sekolah di SMP Negeri 1 Ciamis telah berhasil meningkatkan kedisiplinan siswa di sekolah.

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah ditetapkan, dari hasil penelitian, analisa serta pembahasannya, secara khusus dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

- 1) Implementasi *punishment point system* dalam tata tertib sekolah di SMP Negeri 1 Ciamis dilaksanakan berdasar peraturan perundangan yang berlaku dengan melibatkan seluruh pihak terkait (*stake holder*) pelaksanaan pendidikan di SMP Negeri 1 Ciamis.
- 2) Kendala yang ditemui saat mengimplementasikan *punishment point system* dalam tata tertib sekolah di SMP Negeri 1 Ciamis adalah perlunya sosialisasi yang menyeluruh dan berkesinambungan tentang penerapan *punishment point system* kepada pihak terkait sehingga tidak terjadi salah pengertian. Kendala lain adalah masalah administratif yang timbul dari alur prosedur pelaksanaan penerapan *punishment point system* dalam tata tertib sekolah yang melibatkan berbagai pihak.
- 3) Upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala sosialisasi yang menyeluruh dan berkesinambungan tentang penerapan *punishment point system* diantaranya melalui rapat rutin guru dan tenaga kependidikan di SMP Negeri 1 Ciamis, mengingatkan siswa tentang tata tertib dalam setiap kesempatan seperti dalam upacara bendera setiap hari Senin.
- 4) Penerapan *punishment point system* dalam tata tertib sekolah di SMP Negeri 1 Ciamis mempunyai implikasi yang sangat positif terhadap kedisiplinan siswa SMP Negeri 1 Ciamis, yang diindikasikan dengan rendahnya tingkat pelanggaran yang dilakukan siswa SMP Negeri 1 Ciamis terhadap tata tertib sekolah yang berlaku.

5.2 Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian, analisis serta pembahasannya dengan dukungan teori-teori terkait, penelitian ini mempunyai implikasi terhadap beberapa hal yang merupakan pengembangan wawasan keilmuan (teoritis) maupun praktis, yaitu:

1. Penelitian ini menginformasikan bahwa *punishment point system* secara hukum tidak bertentangan dengan peraturan perundangan khususnya peraturan perundangan mengenai pendidikan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga penerapannya di berbagai lingkungan pendidikan (sekolah) sangat dimungkinkan secara hukum.
2. Penelitian ini menunjukkan bahwa *punishment point system* tidak mempunyai kendala yang cukup berarti dalam penerapannya sehingga sangat memungkinkan untuk diimplementasikan pada setiap lembaga pendidikan (sekolah).
3. Upaya penanganan kendala yang timbul dari pengimplementasian *punishment point system* dalam tata tertib sekolah memerlukan kerjasama dari berbagai pihak terkait sesuai dengan kendala yang dihadapi.
4. Penelitian ini menegaskan bahwa *punishment point system* dapat meningkatkan kedisiplinan siswa dalam menjalankan tata tertib sekolah dan memberikan pendidikan bahwa untuk mengatasi konflik yang terjadi (dalam hal ini konflik antara tata tertib sekolah dengan perilaku siswa) tidak harus selalu diselesaikan melalui hukuman yang bersifat fisik (kekerasan).

5.3 Rekomendasi

Sebagai tindak lanjut dari simpulan serta implikasi dari penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti memberikan beberapa rekomendasi mengenai penerapan *punishment point system* dalam tata tertib sekolah khususnya dalam hubungan dengan peningkatan kedisiplinan siswa di sekolah sebagai berikut:

5.3.1 Bagi Sekolah

1. Sekolah dapat menerapkan *punishment point system* dalam tata tertib sekolah sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kedisiplinan siswa di sekolah dan menanamkan rasa tanggung jawab terhadap segala perbuatan mereka khususnya selama di sekolah.
2. Untuk keberhasilan penerapan *punishment point system* dalam tata tertib sekolah, evaluasi untuk mengidentifikasi berbagai kendala baik teknis pelaksanaan maupun administrasinya selama penerapan *punishment point system* perlu terus dilakukan pihak sekolah dengan melibatkan berbagai pihak terkait.
3. Sekolah dapat membuat laporan mengenai penerapan *punishment point system* dan mempublikasikannya (misalnya dalam bentuk *Best Practise*) sebagai bahan perbandingan bagi sekolah lain sehingga dapat dicapai penerapan *punishment point system* yang paling efektif dan efisien sesuai tujuannya.

5.3.2 Bagi Dinas Pendidikan (Pemerintah Daerah)

1. Mengingat strategisnya peranan tata tertib sekolah dalam pelaksanaan pendidikan, penting kiranya pemerintah daerah atau melalui dinas terkait (Dinas Pendidikan) mengeluarkan peraturan mengenai Pedoman Penyusunan Tata Tertib Sekolah dengan mengakomodasi kearifan lokal guna lebih memberikan kepastian hukum bagi para kepala sekolah dalam menyusun tata tertib di sekolahnya masing-masing.
2. Pemerintah daerah khususnya melalui dinas terkait (Dinas Pendidikan) dapat memfasilitasi pertemuan ilmiah atau deseminasi publikasi ilmiah mengenai penerapan *punishment point system* dalam tata tertib sekolah untuk membekali dan atau sebagai sarana uji banding penerapan *punishment point system* dalam tata tertib sekolah.

5.3.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber informasi mengenai penerapan *punishment point system* dalam tata tertib sekolah khususnya yang berhubungan dengan kedisiplinan siswa di sekolah bagi penelitian sejenis.
2. Penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi pengembangan penelitian yang lebih mendalam, baik penelitian mengenai penerapan *punishment point system* maupun penelitian mengenai kedisiplinan siswa di sekolah.